

BAB V

KESIMPULAN

Prancis sendiri telah beberapa kali terlibat dalam konflik yang terjadi di benua Afrika, dimana banyak terdapat negara-negara bekas jajahan Prancis di benua Afrika pada masa kolonial. Prancis sendiri pernah ikut terlibat di konflik Pantai Gading, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Di Republik Afrika Tengah sendiri Prancis berperan penting dalam konflik etno-politik antara kaum mayoritas Kristen (Anti-Balaka) dengan kaum minoritas Islam (Seleka). Dalam perjalanannya, Republik Afrika Tengah sempat berubah konstitusi menjadi kekaisaran. Akan tetapi hal itu tidak berjalan lama hanya berselang dua tahun, hanya dari 1976 sampai 1979 dan juga diwarnai berapa kali kudeta dalam memperebutkan kekuasaan

Kelompok Pemberontak Seleka terbentuk pada 2012 yang pada awalnya adalah sebuah aliansi yang didukung oleh tiga faksi utama, yaitu: *The Covention Patriotique da Salut du Kodro* (CPSK), *The Convention des Patriotes Pour la Justice et la Paix* (CPJP-Fondamentale), dan *The Union des Forces Democratiquess Pour le Rassemblement* (UFDR), Michel Djotodia adalah pemimpin kelompok pemberontak Seleka. Dan milisi Anti-Balaka terbentuk pada 2013 sebagai akibat dari tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Seleka kepada warga sipil, yang merupakan suatu tradisi perlawanan, dan kurang memiliki struktur komando yang jelas.

Pemicu terjadinya konflik di Republik Afrika Tengah adalah rasa tidak puas terhadap pemerintahan Francois Bozize yang dinilai diskriminatif dan menjalankan politik patronase. Hal tersebut membuat kesenjangan ekonomi, politik, dan sosial yang tinggi antara orang-orang wilayah utara dengan orang-orang wilayah selatan negara tersebut. Francois Bozize lebih suka memilih keluarga atau kelompok tertentu untuk memegang posisi-posisi penting di pemerintahan. Francois

Bozize juga lebih mementingkan orang-orang dari wilayah selatan dalam hal pelayanan publik untuk kepentingan sendiri. Membuat orang-orang dari Utara tersisihkan dari pemerintahan. Kelompok Seleka merupakan kelompok pemberontak yang berbasis dari bagian utara negara tersebut. Selama perjalanannya konflik perebutan kekuasaan telah menjadi konflik yang membawa isu agama antara muslim dan Kristen untuk memobilisasi massa demi kepentingan penguasa politik.

Konflik di Republik Afrika Tengah ini dimulai pada 10 Desember 2012, dimana kelompok pemberontakan Seleka memulai serangannya kepada pemerintahan di ibukota Afrika Tengah yaitu Bangui, dalam upaya pemberontakannya kelompok pemberontak Seleka banyak melakukan pelanggaran HAM, seperti melakukan pemerkosaan, pembunuhan, penjarahan, dan pembakaran tempat tinggal terhadap warga sipil yang mayoritas beragama Kristen. Hanya diperlukan waktu lebih satu bulan bagi kelompok pemberontakan Seleka untuk menguasai ibukota Republik Afrika Tengah yaitu Bangui. Pada 11 Januari 2013, memaksa Presiden Francois Bozize menandatangani perjanjian damai Libreville untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional.

Prancis melakukan intervensi militer di Republik Afrika Tengah berdasarkan mandat resolusi 2127 Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan pada tahun 2013, dan bertujuan untuk menjaga keamanan di Republik Afrika Tengah. Dalam buku "*In the Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict's*" karya Fen Osler Hampson, konsep intervensi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Prancis menggunakan pendekatan *Soft Realism*. Karena jika dilihat dari penyebab konflik yaitu diakibatkan oleh kekacauan domestik, dilema keamanan yang didorong oleh hiper-nasionalisme, dan mobilisasi politik. Strategi penyelesaian konflik adalah melakukan *Peacekeeping*. Dimana pihak ketiga yang melakukan Intervensi adalah kekuatan *Great Power* atau *Middle Power*.

Maka Intervensi militer Prancis di Republik Afrika Tengah telah memenuhi hal-hal tersebut. Dimana Prancis sebagai Pihak ketiga yang melakukan Intervensi merupakan negara *Great Power*. Penyebab konflik etno-politik di Republik Afrika Tengah merupakan akibat dari kekacauan domestik dan mobilisasi politik yang dilakukan oleh kelompok Seleka akibat rasa tidak puas terhadap pemerintahan Francois Bozize yang dinilai diskriminatif dan menjalankan politik patronase. Strategi penyelesaian Prancis adalah mengadakan Operasi Sangaris yang merupakan suatu tindakan *Peacekeeping*. Operasi Sangaris merupakan tindakan *Peacekeeping*, karena dalam tindakan *Peacekeeping* adalah menjaga perdamaian dan keamanan tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik dan melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, mendukung proses konstitusional, pemilihan umum, melindungi dan mempromosikan HAM, memulihkan peraturan perundang-undangan, dan memperluas kewenangan negara yang sah. Operasi Sangaris yang dilakukan oleh Pemerintah Prancis juga melakukan tindakan menjaga keamanan, melindungi warga sipil, dan melakukan *Disarmament* di Republik Afrika Tengah.

Dalam pengamatan penulis, intervensi militer yang dilakukan oleh Prancis dengan mengadakan Operasi Sangaris di Republik Afrika Tengah kurang berhasil dalam mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik. Dikarenakan Operasi Sangaris sendiri dibuat untuk meminimalisir jatuhnya jumlah korban jiwa di Republik Afrika Tengah. hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan-tindakan Pasukan Prancis di Republik Afrika Tengah, yang hanya berfokus pada operasi-operasi pelucutan senjata, pengamanan wilayah yang berkonflik, operasi kemanusiaan, dan pengamanan proses politik di Republik Afrika Tengah. Serta tidak terdapatnya upaya dari pihak Prancis dalam mendamaikan kelompok-kelompok yang berkonflik.